

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia dikejutkan dengan laporan otoritas China kepada WHO (*World Health Organization*) berkaitan dengan penemuan pneumonia yang tidak sewajarnya yang belum mampu diidentifikasi secara komprehensif di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok pada akhir Desember 2019. Namun, pada 7 Januari 2020 otoritas kesehatan China mampu mengidentifikasi sebagai famili *Coronavirus* atau sebagai 2019-nCov yang mampu menjangkit manusia dan hewan dengan menyebabkan infeksi saluran pernafasan mulai dari flu biasa bahkan ke flu yang lebih berat menjadi *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan sindrom pernafasan akut/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Otoritas China berhasil melakukan *tracing* terhadap korban meninggal laki-laki berusia 61 tahun yang saat itu membeli makanan laut di pasar ikan Wuhan, sejak kematian pertama ini menyebabkan penyebaran *Coronavirus Disease* menyebar secara holistik keseluruhan wilayah China bahkan ke luar wilayah China. Otoritas WHO pun mengatakan bahwa *Coronavirus Disease* 19 baru ini akan dinamai Covid-19, kemudian pada 30 Januari 2020 pun ditetapkan sebagai pandemi global (CNN Indonesia, 2020).

Covid-19 dikatakan sebagai pandemi dikarenakan bukan hanya menjangkit suatu wilayah tertentu saja proses penyebarannya, melainkan menjangkit seluruh wilayah dunia tanpa terkecuali, dan maka dari itu Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global yang entah kapan akan berakhir oleh WHO.

Virus Corona bukanlah wabah pandemi baru dalam sejarah kehidupan manusia di muka bumi, proses ini terjadi akibat adanya evolusi hingga mencapai *homo-sapiens* sebagai patogen berbentuk mikro parasit sebagai makhluk hidup berukuran kecil yang membutuhkan inangnya dengan cara berparasit pada manusia, hewan, dan hewan. Mikro parasit ini tumbuh tanpa memberikan manfaat bagi inangnya yang ada malah memberikan kerugian dengan cara menginfeksi

dan merusak metabolisme tubuh inangnya hingga menyebabkan kematian (McNeill, 1976).

Pada saat isu pandemi Covid-19 menyebar ke Indonesia melalui internet dan media lainnya, beragam tanggapan muncul menggiring opini publik terkait pandemi tersebut. Ada yang skeptis, ada yang oportunis, ada yang reaksionis, ada yang politis, ada yang apatis, dan ada yang menganggap sebagai permainan konspirasi. Hingga pada akhirnya pada 14 Maret 2020 terdapat dua warga Depok yang terpapar Covid-19 dan akhirnya penyebarannya sangat cepat dan holistik keseluruh wilayah Indonesia yang menyebabkan para tenaga kesehatan dan otoritas pemerintah kewalahan mengatasi penyebarannya.

Dengan kondisi yang serba tidak menentu akan proses penyebaran Virus Corona atau Covid-19 membuat pemerintah segera membuat kebijakan politik yang mampu mengatasi guna menekan penyebaran virus tersebut di masyarakat, diantara kebijakan yang sudah dilakukan seperti pembatasan kegiatan masyarakat, *Work From Home* (WFH), dilakukannya pembelajaran dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini dilakukan untuk menghentikan mobilitas masyarakat untuk berkerumun, sebab kerumunan memudahkan menimbulkan kluster penyebaran Virus Corona tersebut.

Pandemi Covid-19 merupakan suatu peristiwa yang hadir dalam ruang lingkung kehidupan masyarakat dan memberikan dampak pada semua bidang kehidupan, menyebabkan kematian, macetnya perekonomian, pendidikan, bahkan memengaruhi kegiatan keagamaan. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang hendak diingat, dilihat dan dinilai oleh manusia serta menjadi pengalaman yang bermakna bagi masyarakat.

Adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia ini sangat mempengaruhi ideologi dan paradigma berpikir masyarakat untuk berperilaku sosial, misalnya ada *panic buying* yang terjadi saat diminta oleh pemerintah “di rumah saja” banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong membeli masker, handsanitizer,

disinfektan, dan kebutuhan pokok lainnya untuk menunjang kehidupan selama di rumah. Saat awal pandemi, harga masker, handsanitizer, disinfektan sempat melambung tinggi, dan diperparah dengan adanya oknum yang sengaja menimbun barang-barang tersebut. Bahkan saat penyebaran Virus Corona mulai landai, tetapi banyak mutasi genetik dari virus tersebut menimbulkan kelangkaan pada oksigen, peti mati, dan barang kebutuhan lainnya.

Barbarisme pasar yang terjadi pada saat terjadinya *panic buying* menjadi cikal bakal wabah yang sesungguhnya yang dipengaruhi cara kerja ideologi yang sangat berpengaruh terhadap sistem perekonomian masyarakat, dimana cara kerja sistem ekonomi pasar ini membawa wabah terhadap kehidupan masyarakat dan sistem berbasis akumulasi pasar yang telah merusak kekebalan tubuh sosial yang sangat berdampak pada sistem kekebalan tubuh individu yang sangat membuat wabah Covid-19 menjadi sangat berbahaya.

Disaat banyak masyarakat yang terpapar pun ada konstruksi sosial terhadap pasien tersebut, antara harus dijauhi ataupun dibantu secara moril maupun materil, bahkan beberapa masyarakat Indonesia ada yang sampai mendiskreditkan pasien yang sedang menjalani karantina mandiri dan ada juga pasien yang sudah sembuh malah dijauhi akibat takut masih terdapat virus tersebut. Ada juga masyarakat yang menerima pasien yang telah sembuh dan membantu mensupport secara moral maupun materil pasien yang sedang melakukan karantina mandiri di rumah, sebagai proses pemulihan dari terjangkitnya Virus Corona.

Peran pemerintah yang mengonstruksi pola media pada masyarakat sangat signifikan memberikan koersif di bawah pandemi, dan malah membuat kebingungan yang holistik terkait seberapa ganasnya Virus Corona ini, tapi malah dibuat seakan biasa saja tanpa ada upaya preventif guna menekan penyebarannya melalui proses dogmatisasi melalui beragam peralatan yang pemerintah punya.

*Framing* yang dibentuk pemerintah memuat narasi “perang” yang dimana lawannya ini tidak tampak jelas melainkan melawan mikro-organisme yakni Virus Corona, dan narasi ini pun dicetuskan oleh semua pejabat negara, baik negara

adidaya maupun negara dunia ketiga. Narasi perang dicetuskan sebagai bentuk upaya pengendalian pandemi Covid-19 supaya tidak semakin menyebar keseantero negeri dengan tentara garda terdepannya para tenaga kesehatan (nakes), pejabat publik, penyedia bahan pokok, dan masyarakat sipil dituntut patuh terhadap anjuran pemerintah untuk “dirumah saja”.

Hadirnya pandemi ini membuat pemerintah menjadi bersikap otoriter yang malah membuat masyarakat menjadi tertekan terhadap hal yang diperbuatnya melalui kebijakan politik dan hukum yang berbentuk Perppu, Perpres, dan lain-lain. Hal ini menjadikan pemerintah semakin menjadi-jadi terhadap warganya, akibat terjadinya “pemaksaan” untuk patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja, jaga jarak, dilarang berkerumun, dan larangan lainnya yang menjadikan pemerintah ini sangat diktator.

Pemerintah membangun pola yang sangat signifikan untuk menekan mobilisasi masyarakat dengan dibentuknya regulasi yang menyekat pergerakan masyarakat, dan ini memang menekan angka penyebaran Covid-19, tetapi malah membuat permasalahan baru yakni semakin banyak rakyat yang jatuh miskin dan kelaparan akibat dikurangi mobilisasi massa dan hilangnya pekerjaan.

Dengan pola solidaritas organik yang terbentuk secara tidak langsung atas dasar rasa gotong royong dan kebersamaan, hal tersebut menjadi dasar yang menentukan seseorang tersebut berideologi sosialisme yang sangat relevan terhadap solidaritas sosial berbasis pergumulan intelektual yang diharapkan membantu negara dalam penanganan Covid-19, tetapi banyak disalahartikan sebagai proses pendukung kebangkitan ideologi tersebut, dan bukannya dikaji secara ilmiah.

Menurut Yuval Noah Harari (2020) menyatakan bahwa pandemi Covid-19 sebagai kejadian terburuk setidaknya dalam seratus tahun terakhir, sebab tidak ada satu pun pihak yang mempunyai pengalaman positivistik untuk menghadapi pandemi Covid-19 baik itu pemerintah, pimpinan organisasi, tokoh masyarakat, maupun perorangan. Meski demikian, sejarah peradaban manusia telah

mengalami kejadian yang serupa, meski jenis, dinamika, dan konteksnya tentu saja berbeda dari waktu ke waktu.

Pemenang nobel ekonomi 1998, Amartya Sen dalam sebuah kolom di *Finansial Times* mengungkapkan bahwa masyarakat yang baru saja mengalami pandemi ini akan beralih perekonomiannya lebih baik pasca pandemi Covid-19 ini berakhir. Optimisme itu terlahir dari sejarah pandemi yang sudah dilewati oleh umat manusia; krisis selalu menghadirkan krisis disrupsi pada kehidupan sosial-politik dan ekonomi masyarakat (Prasetyantoko, 2020).

Virus Corona/Covid-19 ditetapkan WHO sebagai pandemi sangat mempengaruhi segala dimensi kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada pergerakan ekonomi akar rumput, dimana mempengaruhi tatanan geo-ekonomi dan geo-politik lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional yang sangat tidak ada pertahanan yang kuat dan persiapan untuk menghadapinya.

Ideologi menjadi peran penting dalam pola penanganan Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian, kebijakan pemerintah, dan perilaku sosial masyarakat yang sangat signifikan terhadap perilaku politik masyarakat dan pola pendekatan sosial yang terjadi di tengah sistem masyarakat.

Pandemi sudah berjalan hampir dua tahun, beberapa negara sudah berdamai dengan pandemi yang sukses membuat *heird immunity* atau kekebalan alami dengan ketaatan warga nya dan keseriusan pemerintahnya menjamin segala kebutuhan yang dibutuhkan warganya saat melakukan isolasi atau pada saat negara tersebut melakukan *lockdown*. Dengan keseriusannya tersebut, dipertengahan tahun 2021 banyak negara sudah mampu menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti Euro 2020, konser musik, dan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dan solidaritas masyarakat yang terorganisir dengan baik.

Indonesia sendiri masih berjuang perang melawan Virus Corona dengan regulasi PPKM yang sampai saat ini masih terus diperpanjang walaupun dengan

kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan upaya percepatan ekonomi masyarakat dan membantu memberantas pengangguran.

Pertentangan ideologi di tengah pandemi sangat signifikan yang mempengaruhi multidimensi kehidupan, dalam implementasi ideologi tersebut mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, dan ini menjadi hal yang sangat fundamental untuk menjalankan kehidupan di kebiasaan baru.

Misalnya disaat pemerintah berusaha mengeluarkan kebijakan untuk menangani permasalahan yang mengikuti alur pandemi, dan para politisi oportunist memanfaatkan sebagai langkah mengakselerasikan keinginannya melalui kebijakan perundang-undangan yang dimaksudkan, seperti RUU Cipta Kerja yang disahkan disaat pandemi sedang tinggi, dan akhirnya menimbulkan kekecewaan masyarakat dan melakukan demonstrasi.

Ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan jaminan ekonomi dan sosial bagi masyarakat bawah ini membuat masyarakat yang sadar akan solidaritas organik membuat aliansi untuk mengamankan masyarakat bawah yang sangat terdampak hal tersebut, dan disini pun perlu adanya jaringan internasional untuk membantu seluruh masyarakat yang memang sangat diperuntukan. Disini terjadi implementasi perlawanan sosialisme terhadap kemapanan yang dikonstruksi oleh kapitalisme yang menggunakan pandemi untuk menghisap keuntungan dari adanya pandemi, tanpa memperhatikan kesejahteraan serta keselamatan sesama masyarakat yang juga terdampak oleh pandemi.

Melemahnya sistem ekonomi akibat pandemi Covid-19 sangat berdampak begitu besar pada seluruh dunia khususnya Indonesia sebagai negara berkembang pasti akan mengalami resesi ekonomi untuk menangani pandemi, dari perkembangan pandemi ini menyebabkan penyekatan mobilitas pekerjaan yang sangat bisa menimbulkan pemecatan sepihak para pekerja dan akhirnya menjadi pengangguran dan menyebabkan peningkatan kemiskinan.

Banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi di tengah pandemi banyak kebutuhan yang sulit diakses akibat terdapat pembatasan akses. Kalau dilihat dari UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Dari poin utama aspek material atau basis ekonomi dapat menjadi katalisator untuk mendapatkan aspek lainnya dan perlu dipenuhi terlebih dahulu poin utama agar mampu menunjang poin lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan survei pada saat Maret 2021 melihat presentase kemiskinan di Indonesia sebesar 10,14% yang membuat angka kemiskinan yang diakibatkan pandemi memperparah tingkat kemiskinan pada masyarakat, belum lagi terdapat 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (1,62 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,65 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,11 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (15,72 juta orang).

Kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah selain untuk penanganan secara medis juga ada kebijakan yang mampu membantu masyarakat secara langsung dalam upaya mencegah meningkatnya secara drastis kemiskinan di tengah pandemi, maka dibuatkan jaring pengaman sosial yang berupa seperti uang tunai, sembako, pemotongan biaya listrik dan sebagainya.

Salah satu dari bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah yang menggunakan berbagai macam sumber dana yang dimiliki pemerintah pusat sampai ke tingkat paling rendah Desa yakni penggunaan Dana Desa sebagai Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 300.000,00 yang didasari oleh PMK Nomor

222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang diprioritaskan kepada masyarakat selama 12 bulan.

Peraturan Kementerian Keuangan tersebut dirasa mampu membantu masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup yang mampu dirasakan bersama kesulitannya mendapatkan pemasukan selama pandemi, dan hal ini pun menjadi proses pemerintah untuk mengamankan rakyat di tengah kesusahan mengelola perekonomiannya.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ini diketahui tertera juga di pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial melalui perlindungan sosial yakni :

1. Perlindungan sosial dimaksudkan mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
2. Perlindungan sosial sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui:
  - a. Bantuan Sosial
  - b. Advokasi Sosial
  - c. Bantuan Hukum

Dalam wawancara dengan Asep Saepudin (2021) menyebutkan dengan adanya program BLT Dana Desa ini diharapkan oleh pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat lansia (lanjut usia) yang rentan di tengah kekurangan pendapatan dari masyarakat lansia yang hanya bekerja serabutan dan mengandalkan pemasukan dari sanak saudaranya, belum lagi rata-rata masyarakat lansia yang mendapatkan BLT Dana Desa sendiri kebanyakan hidup sebatang kara, dan bahkan ada yang hidup sendirian dengan kondisi yang memprihatinkan.

Bantuan Langsung Tunai Dasa Desa sendiri sangat membantu masyarakat lansia, dan juga jika dilihat dari perspektif pemanfaatan BLT Dana Desa digunakan masyarakat lansia yang mampu bekerja untuk membagi uang BLT

antara untuk kehidupan sehari-hari dan ada juga yang digunakan untuk modal usaha seperti kecipring, tembakau, keripik singkong, anyaman bambu, dan sebagainya. Seperti Mak Acah, mendapatkan BLT Dana Desa yang sebesar Rp. 300.000 sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagiannya lagi digunakan untuk modal usaha kecipring yang dipasarkan melalui Gasibu (Goah Samping Ambu) sebagai koperasi yang dibuat pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat dan menguatkan UMKM yang dimiliki warga Desa Citaman.

Dari dibuatkannya kebijakan pemerintah untuk mengelola Dana Desa sebagai BLT yang mampu menjaga kebutuhan masyarakat rentan untuk terpenuhi bisa dirasakan bahwa peran daripada ideologi sosialisme terimplementasikan kepada regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, maka perlu ditingkatkan dan perlu dikawal penyalurannya supaya benar-benar tersalurkan sesuai dengan tepat sasaran atas dasar kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Perubahan sosial tersebut didasari oleh solidaritas organik terbentuk akibat pengaruh dari ideologi yang terkonstruksi sedemikian rupa akibat sejarah peradaban manusia dalam menghadapi beragam krisis dan perjuangan kelas untuk melawan pandemi yang sudah terjadi selama ini, seperti peningkatan kualitas dan menjaga jaminan kesehatan tersebut bisa diakses oleh semua kalangan baik kaya maupun miskin, penjaminan pemerataan gizi bagi seluruh masyarakat, dan peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh otoritas terkait.

Namun, tidak jarang malah terjadi kolaps dan resesi yang terjadi akibat krisis yang malah membawa situasi dan kondisi semakin memburuk akibat pandemi yang berkepanjangan tanpa penanganan yang tepat dengan kebijakan politik yang relevan, dan justru malah menimbulkan konflik sosial dan politik yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Pandemi Covid-19 diyakini akan membuka peluang penyetaraan ekonomi masyarakat yang didasari oleh ideologi sosialisme sebab pemerintah dan pihak pemodal sudah saling berkolaborasi untuk membantu penanganan Pandemi

Covid-19, walaupun pada awalnya membuat beragam ketimpangan yang pada akhirnya menjadi peradaban baru umat manusia (Piketty, 2020).

Dalam kegamangan untuk menghadapi situasi dan kondisi yang luar biasa ini pun menuntut pemerintah mampu menghadapi tataran yang fundamental ke dalam kenormalan baru dalam kebijakan politik, percepatan ekonomi, perubahan sosial, dan hal kolosal lainnya. Kemampuan di setiap negara sangat bervariasi untuk menghasilkan kebijakan yang tepat waktu, sasaran, serta efektif yang pada kenyataannya dalam kondisi tidak menentu.

Konsensus untuk menghadapi pandemi Covid-19 pun harus mampu ditelaah dalam perspektif multidimensi solusi yang akan diambil sebagai kebijakan pemerintah mulai dari elemen kesehatan publik, ekonomi, sosial, politik, teknologi, kebudayaan, dan berbagai aspek lainnya yang relevan mendukung kebijakan tersebut. Hanya dengan kolaborasi seluruh elemen yang dilibatkan baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan sangat diharapkan mampu menjadi partner dalam koneksi lokal maupun interlokal supaya cepat menangani pandemi tersebut.

Saat situasi darurat seperti sekarang ini, masyarakat hanya membutuhkan kebijakan sebagai langkah preventif yang tepat secara tegas dan keteladanan pemerintah dalam mengaktualisasikan kebijakan tersebut di lapangan sesuai antara harapan dengan kenyataan, bukan hanya sebagai intuisi kosong tanpa makna, tetapi memiliki konteks multidimensi sebagai tugas politik untuk mengformulasikan beragam unsur tersebut menjadi kepentingan bersama.

Tugas politik menjadi katalisator yang diemban oleh negara melalui pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan menjadi sebuah kekuatan politik yang dipengaruhi oleh ideologi sebagai bentuk implementasi kepercayaan publik dan berpihak pada masyarakat bawah untuk menekan laju Covid-19 dan membuat pengamanan multidimensi melalui kebijakan, maka dengan kebijakan tersebut yang dipengaruhi ideologi sangat riskan untuk

diintervensi oknum politisi atau pemodal untuk meraih keuntungan, dan maka dari itu kebijakan berada dalam ruang politik.

Dari sini bisa kita lihat kebijakan yang seharusnya berpihak kepada rakyat, tetapi malah berpihak kepada pemodal. Masyarakat yang sadar akan ketidakberesan negara pun mengorganisir diri dengan berusaha menyadarkan akan pentingnya memanusiakan manusia lainnya, terkhusus masyarakat kecil yang tidak bisa WFH dan harus ke lapangan mencari nafkah hanya demi sesuap nasi dan kebutuhan lainnya. Pengorganisasian ini menghimpun para pengusaha yang sadar akan kepentingan masyarakat lain, influencer yang ikut serta mengkampanyekan penggalangan dana, dan organisasi masyarakat yang turut terjun ke lapangan menyalurkan pada yang diperuntukan.

Hal ini menjadi sebuah bentuk implementasi dari ideologi sosialisme yang menginginkan adanya penyetaraan khususnya dibidang sosial, walaupun belum secara holistik mampu diaplikasikan, setidaknya yang diwacanakan oleh Robert Owen terkait masyarakat tanpa kelas dan tanpa sektarian ada betulnya teraktualisasikan selama pandemi ini, menjadi dilematis antara utopian atau tidaknya.

Berbicara utopian, kita selalu terkonstruksi dengan sosialisme yang diidealiskan oleh Robert Owen tentang dunia tanpa kelas dan penyetaraan sosial, tapi dibalik itu tidaklah sepenuhnya salah jika Owen mengatakan demikian, selagi masih terjadi konstruksi pemikiran dalam realita sosial yang nyata.

Gagasan Marx atau lebih dikenal sebagai Marxisme bukanlah sebagai dogma yang mengkonstruksi pemikiran manusia, melainkan menjadi petunjuk jalan aksi bagi manusia untuk melakukan pergerakan perubahan tatanan sosial di dunia ini, maka dengan demikian mampu menjadi entitas yang mampu merevitalisasi nilai-nilai kemanusiaan pasca runtuhnya Uni Soviet sebagai negara basis komunisme terbesar dunia.

Rasa kepekaan berupa simpati dan empati yang dimiliki masyarakat terhadap masyarakat lainnya menjadi sebuah eentitas yang mendorong masyarakat peduli pada rasa kemanusiaan yang tinggi tersebut atas segala penderitaan dan kemelamatan masyarakat kecil akibat pandemi. Solidaritas sosial yang dibentuk sangat diharapkan mampu membantu banyak orang dan menghancurkan kemelamatan dan kesengsaraan yang terjadi dari regulasi pemerintah yang tebang pilih.

Prinsip gotong royong yang menjadi dasar ideologi sosialisme pun sangat tercermin dalam falsafah pancasila yang seharusnya diaktualisasikan secara komprehensif oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Meski demikian, rakyat yang peka terhadap solidaritas sosial pun mengorganisir diri sebagai bentuk gotong royong melawan kesengsaraan dan kemelamatan yang dialami masyarakat miskin.

Desa Citaman yang bertempat di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung menjadi salah satu Desa yang berperan juga dalam penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat, dari penyalurannya peneliti menilai sangat perlu ditinjau lebih komprehensif kembali mengenai pennyalurannya sudah tepat guna atau belum, dan perlu direfleksikan secara holistik mengenai penyaluran BLT Dana Desa sesuai prinsip sosialisme demokratis.

Berdasarkan permasalahan yang sangat signifikan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa antara ketepatan data penyaluran dan juga pemanfaatan yang dilakukan penerimanya. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait relevansi ideologi sosialisme, pandemi Covid-19 dengan BLT Dana desa yang berjudul: **“Corak Sosialisme Demokratis Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari hasil pemaparan diatas pun peneliti berusaha merumuskan fokus permasalahan secara komprehensif yakni:

1. Pergerakan masyarakat untuk bekerja dibatasi sehingga menimbulkan PHK dan menyebabkan peningkatan kemiskinan.
2. Solidaritas sosial sebagai corak dari ideologi sosialisme demokratis meningkat saat ada yang terpapar Covid-19, maupun terkena dampak ekonomi.
3. Terdapat penyaluran BLT Dana Desa secara *door to door* yang dikhawatirkan ada ketidaksesuaian data penerima dengan yang ada di lapangan, dan khawatir ada penyelewengan saat penyalurannya.
4. Transparansi penggunaan Dana Desa terhadap masyarakat.
5. Efektivitas BLT Dana Desa bagi masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan didalam latar belakang masalah dan fokus permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana proses penyaluran BLT Dana Desa di Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung?
2. Apakah sudah tepat penyaluran BLT Dana Desa di Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana proses penyaluran BLT Dana Desa di Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, jika di analisa menggunakan teori ideologi sosialisme demokratis dari Franklyn D. Rooselvelt?

### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi ideologi sosialisme terhadap perlawanan ideologi kapitalisme di masa pandemi Covid-19, adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyaluran BLT Dana Desa di Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui ketepatan penyaluran BLT Dana Desa di Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui proses penyaluran BLT Dana Desa di Desa Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, jika di analisa menggunakan teori ideologi sosialisme demokratis dari Franklyn D. Rooselvelt.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### a. Kegunaan akademis (teoritis)

1. Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu ikut berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Politik, khususnya dalam kajian politik internasional khususnya bidang ideologi.
2. Peneliti pun berharap pada penelitian ini menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya berkaitan ideologi dan pandemi.

##### b. Kegunaan Praktis

1. Untuk Peneliti sendiri pengkajian ini sangat diharapkan dapat menambahnya pengalaman dan wawasan dalam mengkaji penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Penelitian ini pun menjadi syarat dalam meraih gelar Sarjana untuk Peneliti.
2. Hasil penelitian pun di harapkan dapat berperan serta dalam usaha peningkatan penanganan Covid-19 dan berusaha membantu masyarakat proletariat mencapai kesejahteraannya.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Ada beberapa hal-hal pokok yang dijadikan landasan berfikir dalam penelitian ini, untuk memperjelas dan memfokuskan terhadap masalah dan topik yang hendak dikaji, adapun beberapa pengertian tentang permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

Menurut *Business Research* yang di kemukakan dalam Sugiyono (Sugiyono, 2015:60) berpendapat bahwa kerangka berpikir sebagai suatu model konseptual mengenai kaitan teori dengan faktor-faktor yang sudah diidentifikasi sebagai permasalahan yang berpengaruh. Kerangka berpikir dapat dikatakan tepat apabila dapat menjelaskan hubungan teori dengan berbagai variabel yang hendak dikaji.

Teori adalah satu set proposisi yang menyatakan secara logis saling hubungan antara dua atau lebih konsep (variable) untuk tujuan menjelaskan suatu fenomena atau hubungan antara fenomena. Jadi bisa dikatakan juga bahwa kerangka pemikiran adalah satu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Ulber Silalahi, 2009).

Teori-teori merupakan rangkaian konseptual dalam memberikan deskripsi terhadap persoalan yang sedang dikaji. Ideologi merupakan suatu proses produksi makna, tanda, nilai, yang berlangsung dalam kehidupan sosial yang menonjolkan seperangkat gagasan ciri atas keberadaan kelompok sosial maupun kelas tertentu.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti melakukan pengkajian melalui pendekatan secara teori. Pengumpulan data dan hasil penelitian mengenai permasalahan dari teori yang dipergunakan adalah melalui pendekatan keilmuan Ilmu Politik yang berkaitan dengan ideologi.

Ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terdapat dalam berbagai subjek atau kelompok masyarakat yang ada, dijadikan dasar untuk direalisasikannya pemikiran dan semangat hidup masyarakat. Ideologi juga dikatakan sebagai mitos yang menjadi doktrin politik, dan formula politik yang tidak hanya dimiliki oleh negara, organisasi masyarakat, partai politik, dan asosiasi politik.

Ideologi memiliki arti yang sangat multidimensi meliputi: konsepsi manusia mengenai ekosospolbud (ekonomi, sosial, politik, dan budaya) untuk terimplementasikan dalam lingkungan masyarakat berbasis perlindungan negara. Dalam hal ini peneliti berusaha memaparkan melalui pendekatan secara teoritik untuk menggunakan pengumpulan data dan teori melalui pendekatan kajian ilmu politik.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil *Grand Theory* mengenai terdapatnya sepuluh asas *New Deal* untuk menerapkan sosialisme demokratis menurut Franklin D. Roosevelt (1988) yang mengombinasikan *New Freedom* dari Wilson Woodrow dan *Square Deal* dari Theodore Roosevelt dengan menjadi pemikiran

terbaru walaupun corak di dalam pemikiran *New Deal* tersebut terdapat sisi empiris dan pragmatis dalam aktualisasikan di lapangan, hal tersebut menjadi basis perubahan sosial di masyarakat yang terdapat kesenjangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya, sebagai berikut:

1. Pemerintah harus ada dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
2. Pemerintah harus bertanggungjawab atas psikis masyarakat miskin.
3. Pertanian harus disamaratakan dengan dunia industri.
4. Buruh berhak berkonsolidasi dalam berunding secara kolektif.
5. Ekonomi harus terjamin oleh pemerintah bagi masyarakat.
6. Semangat kerja sama kolektif harus menggambarkan etos kerja yang menghilangkan budaya persaingan di masyarakat.
7. Kecenderungan sentrifugal dari sikap individualis secara berlebihan harus diimbangi dengan kesadaran bertanggungjawab penuh untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
8. Segala permasalahan bisa diselesaikan tanpa revolusi dalam kerangka demokrasi.
9. Lembaga pemerintah harus dimodernisasi.
10. Pemerintah harus meningkatkan kekuasaan legislatif atau federal dalam bidang eksekutif supaya menggunakan tenaga ahli, dan mendelegasikan legislatif atau federatif semu dan yudikatif semu pada administrator.

Sosialisme demokratis memandang bahwa perubahan sosial di masyarakat bisa dilakukan melalui reformasi sosial dimana pemerintah bisa menjadi agen-agen perubahan dalam mengambil langkah kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyak hal yang perlu direvisi supaya sosialisme bukan hanya sebagai idealis utopis akan tetapi mampu diaktualisasikan dengan kondisi pemerintahan dan masyarakatnya melalui mengentaskan permasalahan ketimpangan ekonomi, perbaikan kekuasaan di dunia ketiga harus bercermin pada negara maju (Saiman, 2000).

Selain itu pun terdapat empat hal penting menurut Foucault (2010:24) yang sangat berpengaruh dalam ideologi, sebagai berikut:

1. Ekonomi sebagai basis kapital penggerak.
2. Kelas yang dominan melakukan pergerakan.
3. Basis kekuatan repressif.
4. Pertentangan idealis.

Dari kerangka pemikiran yang dijabarkan secara tekstual, maka peneliti merumuskan anggapan dasar sebagai berikut:

Peneliti menilai bahwa relevansi ideologi sosialisme terhadap perlawanan kapitalisme selama pandemi covid-19 perlu dikaji secara holistik supaya ketimpangan yang terjadi di masyarakat tidak signifikan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang melanggengkan status quo kapitalis dalam pandemi.



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

